

RINGKASAN

Penelitian ini mempelajari tentang perlindungan hukum terhadap varian program komputer yang mengalami perkembangan yang cepat bahkan revolusioner, sejak ditemukannya program JAVA dalam INTERNET dan lain-lain program yang mengiringinya. Perkembangan program komputer yang variatif itu berpijak pada dua type dasar yaitu *Operations system software* dan *Applications software*. Terhadap penciptaan program komputer itu, dalam perlindungan hukumnya dapat ditinjau dari aspek preventif dan represif. Sehingga, yang paling urgen menurut penelitian ini adalah menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, mengidentifikasi sehingga dapat diketahui kekuatan perlindungannya dan terlebih lagi mengetahui ketentuan yang potensial menghambat perkembangan penciptaan program komputer.

Metode penelitian adalah kualitatif-normatif, untuk mengetahui asas-asas hukum umum serta doktrin hukum. Asas dan doktrin yang mengikat segenap hukum positif dalam satu kaitan tunggal yang rasional dan berfungsi sebagai sumber yang mampu memberikan "*coherent explanation*" tentang isi normatif hukum yang dalam sistem teknik analisis berpijak pada formulasi asas-asas normatif sebagai premis mayor dan data atau fakta di lapangan sebagai premis minor. Dengan proses induksi-deduksi akan sampai pada jawaban masalah yang diteliti.

Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa perkembangan penciptaan program komputer yang variatif, tidak dapat dengan tegas tertampung dalam rumusan undang-undang hak cipta sehingga

potensi pelanggaran yang ada sulit untuk diproses ke Pengadilan. Hal ini dapat terlihat dengan baru ditanganinya 2 (dua) kasus pembajakan program komputer yaitu di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Negeri Aceh, padahal potensi pelanggaran di masyarakat demikian besar, mengingat program komputer dapat dengan mudah untuk dibajak. Oleh karena itu maka adanya penyidik khusus dalam pelanggaran hak cipta program komputer menjadi sangat relevan dalam rangka penyimpulan kualifikasi tindak pidana terhadap pelanggaran hak cipta program komputer. Dengan dijadikannya pelanggaran hak cipta dari delik aduan menjadi delik biasa, maka faktor waktu ("*tempus delicti*") dan tempat ("*locus delicti*") menjadi relevan sebagai unsur delik. Perbedaan antara "kejahatan" dan "pelanggaran" mengenai program komputer tidak harus mengikuti pembagian menurut KUHP yang didasarkan pada berat ringannya ancaman pidana secara graduil, tetapi pada ada tidaknya unsur kesengajaan dalam kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana ("*criminal responsibility*").

Upaya hukum keperdataan dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal hak ciptanya dilanggar. Dan upaya hukum keperdataan ini dapat diajukan sekaligus dengan tindakan negara dalam hal kepidanaan terhadap tersangka. Bagi konsumen program komputer dalam hal produk itu mengalami kecacatan produk, maka dapat diajukan gugatan sesuai dengan hukum keperdataan yang berlaku yaitu khususnya dalam hal wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

keywords: computer programs
copy rights
legal protection

The following research focuses on rapidly developing computer programs. The various computer programs development is based upon two basic types, that are computer system/system software and applications software. In this respect, computer program is regarded as the same as software on the basis that computer programs will not come into existence without the aid of other parts of software. And the most urgent thing in creating computer programs is to make the inventory and identification of computer program-related regulations for the purpose of knowing the degree of protection and the potential obstacles in developing the creation computer programs.

The qualitative research method applied is aimed at knowing the general principles of law and legal doctrine underlying the existing regulations and laws that function as a source able to provide coherent explanation concerning normative content of law in a legal system. Analysis method is based on the formulation of normative principles as major premise and data/fact as minor premise by using deductive-inductive process.

The research finding shows that the development of various computer program creation has not explicitly been incorporated in copy rights acts in Indonesia. And as a result, the potential infringement of the existing copy right act will be difficult to be brought before court due to the existing different perception by law enforcers. Legal remedy available for creator is to file a lawsuit on the basis of tort. In this regard, criminal sanction has proved ineffective in anticipating various infringement of copy rights in computer program. The existence of qualified special investigator has helped POLRI in investigating the infringement of copy rights in computer programs.
